



Pembentukan Karakter Pancasila untuk Penguatan Civic Disposition di Era Globalisasi

Heni Kurnia^{a,1}, Lathifah Sandra Devi ^{b,2}

^{a,b} Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang

[¹henikurnia892@gmail.com](mailto:henikurnia892@gmail.com) ; [²dosen02859@unpam.ac.id](mailto:dosen02859@unpam.ac.id)

Naskah diterima: 10-09-2025, direvisi: 25-09-2025, disetujui: 30-09-2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran guru PPKn dalam membentuk karakter Pancasila guna memperkuat *civic disposition* siswa di SMK Darussalam Ciputat pada era globalisasi. Latar belakang penelitian didasarkan pada pentingnya pendidikan karakter berbasis nilai pancasila dalam merespon tantangan budaya global, teknologi digital, dan krisis moral generasi muda. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan data dikumpulkan melalui metode observasi, dokumentasi, dan wawancara secara mendalam terhadap kepala sekolah, waka kurikulum, guru PPKn, dan siswa. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa guru PPKn memainkan peran sebagai fasilitator pendidikan karakter, teladan nilai-nilai Pancasila, penggerak civic disposition dan inovator dalam menghadapi tantangan globalisasi. Guru tidak hanya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam perencanaan dan peleaksanaan pembelajaran, tetapi juga membentuk sikap positif siswa melalui keteladanan, pendekatan partisipatif, dan pemanfaatan media digital. Nilai-nilai seperti toleransi, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan disiplin berhasil ditumbuhkan melalui kegiatan intrakulikuler maupun ekstrakulikuler. Tantangan seperti dominasi budaya asing, rendahnya kesadaran etika digital, serta keberagaman latar belakang sosial diatasi dengan strategi pembelajaran kontekstual, kolaboratif, dan berbasis proyek.

Kata-kata kunci: Guru PPKn, *Civic Disposition*, Pendidikan Kewarganegaraan

Abstract

This study aims to describe the role of Civics Education (PPKn) teachers in shaping Pancasila character to strengthen students' civic disposition at SMK Darussalam Ciputat in the era of globalization. The background of this research is based on the importance of character education grounded in Pancasila values in responding to the challenges of global culture, digital technology, and the moral crisis among the younger generation. This study uses a qualitative approach with data collection techniques including observation, documentation, and in-depth interviews with the principal, vice principal of curriculum, Civics Education teachers, and students. According to the findings, teachers of civics education serve as innovators in addressing the problems posed by globalization, facilitators of character education, and role models for Pancasila principles. In addition to incorporating Pancasila values into the design and execution of lessons, educators often use digital media, participatory methods, and model conduct to help students develop good attitudes. Both extracurricular and intramural activities effectively promote values like discipline, social awareness, tolerance, and responsibility. Contextual, collaborative, and project-based learning methodologies are used to address issues such as the diversity of social backgrounds, the domination of foreign cultures, and a lack of awareness of digital ethics.

Keywords: Civics Education Teacher, *Civic Disposition*, Civics Education.

Pendahuluan

Pancasila merupakan pijakan konstitusional dan ideologis bagi bangsa Indonesia yang memiliki peranan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan ditengah masyarakat yang multikultural. Era globalisasi saat ini, semakin terbukanya akses terhadap informasi dan pengaruh budaya asing, *Civic disposition* cenderung mengalami tantangan serius, terutama dikalangan generasi muda. Fenomena ini terlihat dari munculnya pergeseran prilaku yang menunjukkan lemahnya penerapan moralitas, etika, dan kebangsaan dalam rutinitas sehari-hari. Menurut laporan Kemendikbudristek (2022), hanya 43% siswa yang benar-benar memahami dan menerapkan *Civic disposition* dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencerminkan adanya penurunan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dasar bangsa. Serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2023), mencatat peningkatan kasus kenakalan remaja, seperti perundungan (*Bullying*), tawuran dan penyalahgunaan media sosial. Prilaku ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral, etika, dan kebangsaan semakin tergerus. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI, 2022), juga telah mensurvei bahwa 65% remaja lebih tertarik pada budaya luar dibandingkan budaya lokal. Hal ini berdampak pada semakin berkurangnya semangat gotong royong, sikap hormat terhadap orang yang lebih tua, dan nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat. Data ini menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan *Civic disposition* dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat berakibat pada melemahnya persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatnya konflik sosial di masa depan. Globalisasi juga membawa banyak manfaat, tetapi juga tantangan besar dalam menjaga identitas nasional, jika peseta didik tidak diberikan pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai kebangsaan, maka mereka akan lebih mudah terpengaruh oleh budaya luar yang belum tentu sejalan dengan *Civic Disposition*. Jadi guru PPKn menjadi begitu krusial didalam memperkuat pemahaman serta pengalaman *Civic disposition* di lingkungan sekolah, harus mampu mengembangkan metode belajar yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki nilai praktis, aplikatif dan relevan dengan kehidupan siswa.

Aturan yang terdapat dalam UUD 1945 pasal 31 dan pasal 281, secara tegas mengatur hak atas pendidikan dan kewajiban Negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, Undang-undang No.20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengarispawahinya pentingnya pendidikan karakter dan penerapan *Civic disposition* dalam kegiatan pembelajaran. Dimana, Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan Siap terhadap tuntutan perubahan zaman. Serta kurikulum merdeka, yang saat ini diterapkan semakin memperkuat posisi pendidikan karakter sebagai komponen integral dalam pengembangan siswa yang diberikan keleluasaan lebih kepada sekolah dan guru untuk merancang proses pembelajaran, juga menekankan betapa pentingnya model pembelajaran yang berpusat pada proyek seperti Pendekatan *Project-Based Learning (PBL)* mendorong peserta didik untuk dapat mengerti dan mengamalkan *Civic disposition* dalam aktifitas sehari-hari seperti penggunaan studi kasus dalam kehidupan nyata, simulasi, diskusi interaktif, serta proyek kolaboratif yang melibatkan siswa secara aktif.

Menurut teori Konstruktivisme, pembelajaran PPKn harus interaktif dan berfokus pada pengalaman nyata siswa, sehingga *Civic disposition* dapat diimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari. Jean Piaget (1972), menegaskan bahwa pembelajaran yang efektif harus berbasis pengalaman nyata agar siswa dapat menghubungkan teori dengan kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, pendekatan berbasis proyek dan studi kasus akan membantu siswa memahami serta

menerapkan *Civic disposition* dalam menghadapi tantangan globalisasi. Teori perkembangan moral Kholberg juga relevan dalam menjelaskan tahapan perkembangan moral individu dan bagaimana pendidikan moral dapat membentuk karakter. Serta konsep globalisasi juga menjelaskan pengaruh lingkungan global terhadap nilai-nilai budaya dan tantangan dalam mempertahankan identitas nasional. Kemendikbud, menekankan bahwa pendidikan karakter dalam kurikulum harus berbasis pada *Civic disposition* untuk membentuk generasi yang berintegritas, nasionalis, dan berdaya saing di era globalisasi.

Karakter Pancasila dalam konteks pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kepribadian siswa agar memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat. Menurut Kemdikbudristek (2022), karakter Pancasila mencakup nilai-nilai seperti religiusitas, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang harus diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di era globalisasi, tantangan dalam menanamkan karakter Pancasila semakin kompleks. Pengaruh media sosial, budaya luar, dan perubahan sosial-ekonomi membuat banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami serta menerapkan *Civic disposition* dalam keseharian mereka. Komponen utama dalam pendidikan karakter mencakup *Civic Disposition*, yaitu watak atau karakter, sikap dan kebiasaan yang mendukung partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. *Civic disposition* mencakup rasa tanggung jawab sosial, kesadaran hukum dan ketataan pada aturan, toleransi dan saling menghormati, kedulian terhadap bangsa dan negara. Oleh karena itu, peran guru, khususnya dalam mata pelajaran PPKn, menjadi sangat penting dalam membimbing siswa agar tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Pancasila.

Guru PPKn harus meningkatkan kompetensi dan kesadaran dalam menghadapi tantangan globalisasi. Dukungan dari semua pemangku kepentingan pendidikan diperlukan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan generasi muda Indonesia, (Sri Weni, 2024). Sedangkan Penerapan *Civic disposition* di era globalisasi memerlukan peran aktif guru pada mengaitkan materi yang mengandung konteks aktivitas sehari-hari siswa. Guru harus mampu mengembangkan metode pembelajaran yang relevan agar siswa dapat menginternalisasi nilai-nilai tersebut secara efektif, (Widianti&Dinie, 2022). Pendapat diatas menegaskan bahwa peran guru PPKn sangat krusial dalam menginternalisasikan *Civic disposition* pada siswa. Melalui pendekatan pemebelajaran yang kontekstual, inovatif, dan relevan dengan tantangan di era globalisasi guru dapat membentuk karakter siswa yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Terlihat bahwa di SMK Darussalam Ciputat ditemukan adanya penuruanan *Civic disposition* dikalangan generasi muda seperti, menurunnya kesadaran akan nilai-nilai Pancasila, menurunnya rasa nasionalisme dan kedulian sosial, lemahnya etika bermedia sosial, yang menuntut penguatan *Civic disposition* lebih mendalam. Hal ini diperparah oleh pengaruh globalisasi yang begitu cepat. Kondisi ini yang menuntut guru PPKn untuk lebih proaktif dalam mengatasi masalah-masalah karakter yang muncul, terutama terkait kedisiplinan, tanggung jawab, dan kebersamaan yang merupakan implementasi nyata dari *Civic Disposition*. Di sinilah desain pendidikan karakter harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi utama untuk membangun kepribadian siswa yang kuat, jujur, dan bernasionalisme. Penguatan *Civic disposition* di era globalisasi sangat penting untuk menjaga identitas bangsa. Guru PPKn diharapkan menjadi ujung tombak dalam menanamkan *Civic disposition* dan membimbing siswa agar tetap menjunjung nilai-nilai kebangsaan ditengah modernisasi dan globalisasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini hadir dengan gagasan untuk menggali lebih dalam tentang tugas guru PPKn dan usaha memperkokoh *Civic disposition* ditengah derasnya arus globalisasi. Fokus penelitian ini akan tertuju pada SMK

Darussalam Ciputat sebagai salah satu institusi pendidikan menengah yang bertugas strategis untuk membentuk jati diri anak bangsa. Penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana peran guru PPKn dalam membimbing siswa dalam menginternalisasikan *Civic Disposition*, baik melalui pendekatan pedagogis maupun teladan perilaku.

Tinjauan pustaka terhadap penelitian terdahulu dimana banyak membahas tentang pentingnya pendidikan karakter, tetapi penelitian mengenai tentang peran guru PPKn dalam konteks penguatan *Civic disposition* di era globalisasi khususnya di SMK Darussalam Ciputat belum banyak dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang baru dalam memahami bagaimana guru dapat secara efektif dalam menjaga relevansi Pancasila dikalangan siswa dan dapat memberikan wawasan baru mengenai bagaimana peran guru PPKn dapat mengoptimalkan untuk memperkuat *Civic disposition* dikalangan siswa di era globalisasi. Mengingat pentingnya *Civic disposition* dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya penguatan *Civic disposition* tersebut khususnya dilingkungan sekolah. Dengan demikian, penguatan peran guru PPKn dalam pembelajaran yang relevan dan kontekstual menjadi kebutuhan mendesak di era globalisasi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Fenomenologis yang akan menggali lebih dalam mengenai strategi, metode, serta inovasi yang dilakukan oleh guru PPKn dalam mengajarkan *Civic disposition* ditengah perkembangan teknologi dan budaya global. Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti bagaimana guru PPKn dapat berperan sebagai agen perubahan yang mampu menanamkan kesadaran dan komitmen dikalangan siswa. Diharapkan penelitian yang berjudul Peran guru PPKn dalam pembentukan karakter Pancasila untuk penguatan *civic disposition* di SMK Darussalam Ciputat, dapat memberikan solusi praktis dan aplikatif bagi para guru PPKn serta menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum yang lebih responsif terhadap dinamika globalisasi tanpa mengesampingkan identitas nasional.

Metode

Penelitian ini dilakukan di SMK Darussalam Ciputat dengan dilakukan melalui metode kualitatif deskritif menggunakan pendekatan fenomenologi, Tujuannya, riset ini membahas bagaimana guru PPKn berperan dalam membentuk karakter siswa di sekolah untuk memahami fenomena secara mendalam, baik dari segi perilaku, persepsi, motivasi, maupun interaksi individu ataupun kelompok. Fokus utamanya adalah makna subjektif yang diberikan oleh partisipan terhadap fenomena yang mereka alami, (Sugiyono, 2013). Penelitian kualitatif meneliti kondisi objek alamiah dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh melalui data primer dan skunder.

Hasil dan Pembahasan

Kontribusi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Pengembangan karakter siswa guna memperkuat sikap kewarganegaraan (*civic disposition*) menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan globalisasi yang semakin kompleks. Sebagai pendidik, mereka tidak hanya harus memberi siswa materi, melainkan mereka harus mampu melestarikan dan memperkuat nilai-nilai nasional lewat pendekatan yaitu inovatif serta kontekstual. Hal tersebut untuk membantu siswa memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, diperlukan strategi pembelajaran yang tidak hanya berbasis teori tetapi juga berbasis pengalaman. Studi ini juga memperkuat temuan penelitian Dewi Mutmainah dan Kamaluddin (2018) yang menyatakan bahwa

guru PPKn bukan hanya mengajar tetapi juga memimpin sikap dan perilaku siswa. Di SMK Darussalam Ciputat, guru berusaha menanamkan nilai-nilai seperti disiplin, toleransi, dan gotong royong dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Bukan sekadar bertujuan meningkatkan kemampuan akademik siswa, melainkan juga guna menumbuhkan rasa nasionalisme, Pedoman moral, tanggung jawab sosial, dan rasa solidaritas. PPKn sangat membantu menginternalisasikan jiwa nasionalisme seperti, tanggung jawab sosial, keadilan, dan toleransi. Landasan moral ini sangat kursial untuk membentuk kepribadian generasi penerus yang menjunjung nilai kejujuran dan berdaya saing. Dalam pandangan Lickona (1991) tentang pendidikan karakter, *Civic disposition* dipandang sebagai bagian aspek penting dalam pembentukan karakter warga negara termasuk pada prinsip moral seperti empati, tanggung jawab, dan kejujuran. Maka dari itu, peran guru PPKn tidak hanya harus berkonsentrasi pada meningkatkan kemampuan akademik siswa mereka, tetapi mereka juga harus mampu memasukkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam pikiran dan perilaku siswa mereka untuk membangun kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guru PPKn dalam konteks ini berperan strategis dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dan memperkuat sikap *civic* di kalangan siswa. Guru PPKn berperan dalam membangun kesadaran siswa sebagai warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Mereka mengajak siswa berdiskusi tentang isu-isu aktual bangsa, mengembangkan kepedulian sosial, dan mengintegrasikan nilai-nilai kewarganegaraan ke dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler seperti OSIS dan kegiatan sosial lainnya.

Civic disposition adalah pondasi karakter kewarganegaraan yang kuat dan menjadi salah satu tujuan utama pendidikan PPKn, yaitu membentuk warga negara yang berkarakter Pancasila, aktif dalam demokrasi, dan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. *Civic disposition* dapat membantu siswa menjadi lebih sadar hukum tentang tata tertib, terutama dengan menanamkan disiplin dan sikap tanggung jawab. Ini membantu siswa memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan memahami aturan yang telah ditetapkan, Wahyu Kusnaeni (2024). *Civic disposition* merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan kewarganegaraan (*civic education*), yang merujuk pada sikap, nilai, dan kecenderungan warga negara untuk berpartisipasi secara aktif, bertanggung jawab, dan etis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penelitian dari Budi Mulyono (2017), mengatakan *Civic disposition* merupakan Salah satu kompetensi kewarganegaraan dalam pendidikan kewarganegaraan (*civic competences*), yang disampaikan juga oleh Branson (1998), kompetensi kewarganegaraan terbagi menjadi tiga aspek utama. Pertama, *Civic Knowledge* (Pengetahuan Kewarganegaraan), yang mencakup pemahaman warga negara terhadap berbagai konsep dan nilai yang seharusnya diketahui. Kedua, *Civic Skill* (Kecakapan Kewarganegaraan), yaitu keterampilan intelektual dan partisipatif yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, *Civic disposition* (Watak Kewarganegaraan), yang merujuk pada karakter publik dan privat yang berperan penting dalam menjaga serta mengembangkan demokrasi konstitusional. Dalam hal ini, Menjelaskan bahwa *Civic disposition* bertujuan untuk menumbuhkan sifat-sifat warga negara, baik yang bersifat privat seperti kesopanan, disiplin, tanggung jawab, ketegaran/kesabaran, dan keteguran hati, serta sifat-sifat publik seperti peduli, kompromi, keterbukaan pikiran, keberagaman dan toleransi. *Civic disposition* pada dasarnya terkait dengan cara siswa hidup sebagai warga negara atau anggota masyarakat yang berlandasan nilai-nilai pancasila.

Penguatan *Civic disposition* menjadi semakin penting di era globalisasi dan digitalisasi seperti saat ini. Siswa tidak hanya dihadapkan pada realitas lokal tetapi juga harus mampu bersikap bijak

dalam menghadapi informasi dari seluruh dunia, termasuk ideologi, budaya populer, dan tantangan terhadap nilai-nilai nasional. Oleh karena itu, PPKn memiliki tujuan strategis untuk membekali siswa dengan nilai-nilai Pancasila sebagai kompas moral dan etika sosial serta menanamkan rasa bertanggung jawab dalam menggunakan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Untuk menjadi warga negara yang baik, kita harus memiliki dan menanamkan sifat-sifat baik yang berlandaskan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan kita. Pendidikan PPKn semakin penting di era globalisasi, sebagaimana dalam buku nya, Ani Sri Rahayu (2017:1), PPKn adalah penelitian tentang kehidupan sehari-hari yang mengajarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik dan menghormati Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia.

Sebagai hasilnya *Civic disposition* adalah manifestasi nyata dari sifat kewarganegaraan yang tumbuh melalui proses pendidikan, bukan sekadar penguasaan aturan dan norma. *Civic disposition* menunjukkan bahwa seseorang siap menjadi warga negara yang kritis, cerdas dan berprinsip demokratis dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat umum. Ini berarti bahwa pendidikan PPKn tidak hanya harus mengajarkan siswa hak dan tanggung jawab mereka selain sebagai warga negara, harus membangun karakter dan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, kemampuan guru untuk menerapkan nilai-nilai kebangsaan dalam praktik pedagogis yang kontekstual, bermakna, dan berkelanjutan adalah faktor utama yang menentukan keberhasilan pembelajaran PPKn. SMK Darussalam Ciputat sebagai lembaga pendidikan menengah kejuruan, yang memiliki tanggung jawab besar untuk membentuk siswa yang tidak hanya memiliki kemampuan profesional, tetapi juga matang secara moral dan sosial sebagai warga negara Indonesia yang Pancasilais.

Guru PPKn sebagai tenaga pendidik, memiliki tugas yang lebih luas dari pada hanya menyampaikan materi pelajaran di kelas. Selain itu, mereka berfungsi sebagai pendidik karakter, memungkinkan pendidikan berbasis nilai-nilai kebangsaan, dan mendorong kegiatan yang mendorong siswa untuk menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka. I Made Sila et al. (2023) menekankan bahwa guru sangat penting dalam membentuk kedisiplinan siswa dengan mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa. Guru PPKn berusaha memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa tentang pentingnya *Civic disposition* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran yang kreatif.

Banyak metode yang digunakan dalam proses pembelajaran, termasuk simulasi demokrasi, diskusi studi kasus, dan pembelajaran berbasis proyek melalui berbagai metode pembelajaran berbasis pengalaman tersebut, temuan Ini sejalan dengan konsep perkembangan moral Kohlberg (1984) yang menyatakan bahwa pendidikan moral harus diberikan secara bertahap melalui pengalaman nyata dan keteladanan yang diberikan oleh guru atau pendidik.

Temuan studi ini memperlihatkan bahwa guru PPKn bertanggung jawab atas peran yang dijalankan diantaranya sebagai berikut:

Fasilitator Pendidikan Karakter

Peran guru PPKn Sebagai fasilitator dan tanggung jawab adalah memfasilitasi lingkungan pembelajaran yang kondusif dan berbasis pengalaman nyata sehingga siswa dapat memahami, menginternalisasi, dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini berarti siswa harus memiliki pengalaman langsung dengan *Civic disposition* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, guru PPKn harus menjadi role model yang disiplin, tanggung jawab, dan toleran dalam berinteraksi dengan siswa mereka. Selain itu, sebagai agen

perubahan, guru PPKn harus terus berinovasi untuk membuat metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan generasi digital saat ini.

Teladan Nilai-Nilai Pancasila

Guru harus menjadi contoh nyata dalam sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila sebagai kejujuran, disiplin, tanggung jawab serta toleransi. Ketika interaksi setiap hari di sekolah, guru PPKn harus memperlihatkan sikap santun dan adil, sehingga siswa dapat meneladani nilai-nilai tersebut. Guru PPKn menjadi kunci dalam penanaman nilai-nilai Pancasila menjadi tanggung jawab besar dalam upaya membentuk karakter bangsa yang beradab dan berkepribadian dan memperkuat sikap *Civic disposition* di kalangan siswa, untuk mendukung keterampilan dan pengetahuan warga negara, yang harus memiliki sikap kewarganegaraan, juga dikenal sebagai karakter kewarganegaraan.

Pengerak *Civic disposition*

Guru PPKn berperan dalam membangun kesadaran siswa sebagai warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Mereka mengajak siswa berdiskusi tentang isu-isu aktual bangsa, mengembangkan kepedulian sosial, dan mengintegrasikan nilai-nilai kewarganegaraan ke dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler seperti OSIS dan kegiatan sosial lainnya.

Inovator dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi

Guru PPKn turut menghadirkan strategi inovatif dalam pembelajaran, seperti pemanfaatan teknologi digital (*Google Classroom*, YouTube, media sosial edukatif) untuk menyampaikan materi nilai kebangsaan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila masih relevan dan menarik di tengah budaya digital yang semakin mendominasi.

Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa salah satu aspek penting adalah upaya guru PPKn untuk menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman nyata dengan tujuan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran mereka. Teori Konstruktivisme Piaget (1972) yang menekankan bahwa siswa akan lebih mudah memahami konsep abstrak jika mereka menghubungkannya dengan hal-hal yang mereka lakukan setiap hari. Dalam pendidikan kewarganegaraan, *Civic disposition* harus diajarkan dalam kehidupan nyata. Ini berarti tidak hanya harus diajarkan di kelas, tetapi juga dipraktikkan dalam berbagai aktivitas, seperti memecahkan masalah, berinteraksi dengan orang lain, dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan di dunia nyata. PPKn memainkan peran penting dalam penguatan *Civic disposition* siswa, yaitu sikap dan karakter yang mencerminkan kewajiban mereka sebagai warga negara yang aktif, kritis, dan bermoral.

Guru PPKn terus berusaha menggunakan strategi pembelajaran yang kontekstual dan inovatif meskipun mereka menghadapi banyak tantangan. Ini termasuk pengaruh budaya asing, partisipasi rendah siswa dalam kegiatan karakter, dan kurangnya literasi digital yang beretika. Siswa dapat tumbuh menjadi warga negara yang bermoral, sadar hukum, dan berkomitmen pada nilai-nilai bangsa melalui penggunaan kurikulum merdeka, pembelajaran berbasis proyek, kerja sama lintas lingkungan, dan optimalisasi media digital. Dengan demikian, untuk membentuk generasi muda yang unggul, jujur, dan berjati diri bangsa, penguatan *civic disposition* melalui pembelajaran PPKn harus dilakukan secara berkelanjutan dengan dukungan dari seluruh elemen pendidikan.

Menghadapi tantangan globalisasi yang kompleks, guru PPKn di SMK Darussalam Ciputat telah menyusun dan menerapkan berbagai strategi pembelajaran guna memperkuat *Civic disposition* siswa. Strategi ini dirancang agar pembelajaran bukan hanya kognitif dan teoritis, tetapi dapat juga membentuk karakter dan perilaku kewarganegaraan yang aktif, bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini sejalan dengan permen, peraturan No. 20 Tahun 2018 mengenai penguatan pendidikan karakter dilembaga pendidikan

formal, yang menegaskan bahwa pendidikan karakter harus diterapkan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip pancasila.

Strategi yang digunakan oleh guru PPKn di SMK Darussalam Ciputat tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kognitif siswa tentang materi kewarganegaraan, tetapi juga untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang materi kewarganegaraan. Melainkan mereka juga memiliki rasa nasionalisme yang kuat, yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan partisipasi sosial mereka ditengah tantangan era globalisasi. Kebijakan Kemendikbudristek (2022), yang menegaskan bahwa pendidikan nasional harus berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional indonesia, dan mampu menjawab tantangan perubahan zaman.

Berikut adalah beberapa starategi yang dilakukan oleh guru PPKn di SMK Darussalam Ciputat dalam memperkuat *Civic disposition* siswa di tengah arus globalisasi yaitu:

Peningkatan Kompetensi Guru

Melalui pelatihan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi pembelajaran dan pendekatan pedagogis yang inventif untuk pendidikan karakter. Guru harus terus belajar membuat metode pembelajaran yang relevan dengan kurikulum dan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan generasi digital. Penggunaan platform e-learning, pembuatan media ajar digital, dan menggabungkan nilai-nilai nasional ke dalam materi pembelajaran yang menarik dan interaktif.

Mengoptimalkan penggunaan Kurikulum Merdeka

Memberikan guru lebih banyak kebebasan dalam merancang pembelajaran kontekstual dan berbasis proyek. Dalam situasi seperti ini, guru PPKn memiliki kesempatan untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan masalah sosial yang dihadapi siswa mereka, seperti hak dan kewajiban warga negara, keberagaman, dan toleransi. Pembelajaran yang didasarkan pada pengalaman dan masalah aktual ini mendorong siswa untuk menggunakan pemikiran kritis dan meningkatkan kesadaran sosial dan patriotisme mereka.

Kolaborasi dengan Orang Tua dan Masyarakat

Sebagai komponen penting dari ekosistem pendidikan karakter bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat. Nilai-nilai nasional diperkuat selain di sekolah, penerapannya juga dapat ditemukan di lingkungan keluarga serta interaksi sosial siswa melalui komunikasi yang intens, kegiatan parenting, dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan sekolah. Strategi ini sejalan dengan pendekatan ekologi dalam pendidikan yang dikemukakan oleh Bronfenbrenner, yang menyatakan bahwa berbagai lapisan lingkungan yang saling berinteraksi memengaruhi perkembangan karakter seseorang.

Pemanfaatan Media Sosial

Guru PPKn tidak hanya mengajarkan siswa untuk menggunakan teknologi dengan bijak, tetapi juga mendorong mereka untuk membuat konten digital bertema kebangsaan, seperti poster edukatif tentang nilai-nilai Pancasila, video kampanye anti-toleransi, dan konten reflektif tentang masalah sosial. Dengan demikian, media sosial tidak lagi hanya tempat untuk mengonsumsi informasi, tetapi juga tempat untuk menyuarakan nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat *Civic disposition* secara kreatif.

Untuk mencapai tujuan tersebut, guru PPKn dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran kreatif dan inovatif untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Hal ini sejalan dengan Penelitian M.Yusuf et al. (2024) menyatakan bahwa pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan nasionalisme siswa. Beberapa model pembelajaran yang relevan untuk digunakan adalah:



Project-Based Learning (PJBL) dan Problem Based Learning (PBL), di mana siswa dilibatkan secara aktif dalam kegiatan yang bersifat kolaboratif dan aplikatif, Misalnya, proyek toleransi, kampanye anti-perundungan, atau simulasi pemilu mini di sekolah.

Diskusi dan Studi kasus, memungkinkan siswa berbicara satu sama lain dan membangun pemikiran kritis, empati, dan toleransi terhadap perbedaan serta digunakan untuk menganalisis secara kritis berbagai fenomena sosial dan masalah nasional yang berkaitan dengan kehidupan sisw.

Teknologi dalam Pembelajaran

Untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik dan relevan dengan kehidupan siswa di era digital, guru memanfaatkan media digital seperti Google Classroom, YouTube, dan forum diskusi online.

Meskipun berbagai pendekatan pembelajaran telah digunakan, guru PPKn masih menghadapi banyak tantangan dalam memperkuat *Civic disposition*. Pengaruh budaya luar dan media sosial adalah masalah terbesar; ini membuat siswa lebih familiar dengan budaya luar daripada budaya lokal. Sebagai hasil dari Survei yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2022, ditemukan bahwa sebanyak 65% remaja Indonesia lebih tertarik pada budaya asing. Ini berdampak pada pengurangan minat terhadap nilai-nilai lokal seperti disiplin, gotong royong, dan rasa saling menghargai. Selain itu, tantangan lain adalah kurangnya kesadaran dan keterlibatan siswa dalam kegiatan berbasis kebangsaan. Banyak siswa masih menganggap kegiatan pendidikan karakter sebagai formalitas dan bukan kebutuhan esensial untuk kehidupan mereka.

Penerapan *Civic disposition* di era globalisasi menuntut peran aktif guru dalam mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Oleh karena itu, inovasi pembelajaran dan pendekatan yang kontekstual menjadi suatu keniscayaan. Dianisa Wahyuni et al. (2021) juga menekankan bahwa globalisasi menimbulkan tantangan moral bagi generasi muda dan betapa pentingnya guru menjadi contoh bagi siswa mereka untuk melindungi mereka dari efek negatifnya.

Guru PPKn di SMK Darussalam Ciputat pada era globalisasi menghadapi berbagai tantangan dalam membentuk karakter Pancasila dan memperkuat *Civic disposition* atau sikap kewarganegaraan siswa. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

Pengaruh Budaya Asing

Siswa semakin terpapar dengan beragam informasi dari seluruh dunia, termasuk nilai-nilai yang mungkin bertentangan dengan Pancasila, seperti hedonisme dan individualisme ekstrem. Hal ini dapat mengurangi rasa nasionalisme dan kedulian sosial mereka.

Kurangnya Kesadaran terhadap Etika Bermedia Sosial

Siswa seringkali tidak memahami etika bermedia sosial yang sesuai dengan nilai Pancasila meskipun ada banyak media sosial yang memungkinkan mereka untuk lebih bebas berbicara. Ini dapat menyebabkan penyebaran hoaks, ujaran kebencian, atau sikap intoleran.

Minimnya Keteladanan dan Internalisasi Nilai Pancasila

Tantangan lainnya adalah bagaimana guru dapat memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ini karena pembentukan karakter lebih efektif melalui contoh langsung daripada hanya mengajar teori di kelas.

Perbedaan Latar Belakang Sosial dan Budaya

Siswa di SMK Darussalam Ciputat berasal dari berbagai latar belakang sosial dan budaya. Ini dapat menjadi tantangan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya ikatan nasional.

Tantangan dalam Model Pembelajaran yang Relevan

Jika hanya menggunakan metode ceramah, pembelajaran PPKn sering dianggap membosankan. Di era digital, guru harus membuat model pembelajaran yang menarik, interaktif, dan sesuai untuk siswa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMK Darussalam Ciputat tentang kontribusi guru PPKn terhadap pembentukan karakter Pancasila untuk penguatan *civic disposition* bahwa Guru PPKn memiliki tanggung jawab yang strategis dan penting untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila serta membentuk sifat siswa melalui proses pembelajaran yang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga bersifat afektif dan psikomotorik. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada penyampaian materi saja, melainkan sebagai pengajar, pendidik, pembimbing, fasilitator, motivator, dan evaluator dan inovator dalam pembelajaran yang mencakup aspek pembinaan karakter, keteladanan dalam bersikap, serta penggunaan proses belajar yang kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman. Melalui peran ini, pendidik dapat membangun karakter siswa yang tidak hanya memahami nilai-nilai Pancasila secara kognitif, tetapi juga menginternalisasi dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia digital maupun nyata.

Strategi guru PPKn yang berfokus pada pembentukan karakter Pancasila untuk penguatan *Civic Disposition* di SMK Darussalam Ciputat, Melalui pendekatan pembelajaran yang inovatif, seperti diskusi, studi kasus, pembelajaran berbasis proyek dan masalah *Project Based Learning (PjBL)*, dan *Problem Based Learning (PBL)*. serta pembelajaran teknologi digital, guru PPKn berhasil mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kegiatan belajar mengajar. Siswa menunjukkan sikap yang sesuai dengan prinsip *civic disposition*, seperti kewajiban, toleransi, kepedulian social, dan kedisiplinan. Pembelajaran PPKn yang dirancang secara kontekstual telah mendorong siswa untuk bersikap kritis terhadap pengaruh globalisasi serta mampu mempertahankan identitas nasionalnya termasuk dalam hal kegiatan dalam proses belajar maupun penerapannya di kehidupan nyata. Strategi ini menunjukkan keberhasilan dalam membangun sikap seperti tanggung jawab, toleransi, nasionalisme, dan kepedulian sosial.

Tantangan yang dihadapi oleh guru PPKn saat membangun karakter Pancasila untuk penguatan *Civic Disposition* di SMK Darussalam Ciputat, Guru tetap menghadapi berbagai tantangan dalam proses pembelajaran, seperti pengaruh budaya asing melalui media digital, rendahnya kesadaran siswa terhadap etika bermedia social, serta masih terbatasnya keterlibatan siswa dalam kegiatan berbasis nilai kebangsaan. Namun, guru PPKn di SMK Darussalam Ciputat, dituntut dan terus berupaya untuk berinovasi dan merancang konsep pembelajaran yang adaptif, berorientasi, relevan dan kontekstual dan mengikuti kemajuan peradaban dan sekolah perlu memperkuat program-program berbasis karakter yang mendukung pembentukan siswa yang nasionalis, religious, dan berintegrasi tinggi. Tantangan ini juga menjadi refleksi penting bahwa Pendidikan karakter perlu didukung oleh semua pihak, termasuk lembaga Pendidikan, keluarga, dan Masyarakat. Kondisi ini membuat internalisasi prinsip-prinsip Pancasila lebih sulit jika tidak diimbangi dengan metode pembelajaran yang tepat.

Berdasarkan temuan tersebut, Diharapkan memperkuat sinergi antara kurikulum, kegiatan kesiswaan, serta pembinaan karakter dalam program ekstrakurikuler agar nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup dalam keseharian siswa. Memperkuat kerja sama dengan orang tua dan Masyarakat dalam membentuk karakter siswa, sehingga nilai-nilai kebangsaan tidak hanya dibentuk diruang kelas, tetapi juga diperkuat dilingkungan keluarga dan social mereka, dan guru PPKn terus meningkatkan kualitas pembelajaran melalui inovasi-inovasi pedagogis yang lebih aplikatif, kontekstual yang lebih banyak memanfaatkan pendekatan berbasis proyek, studi kasus, dan media digital edukatif dan menjadi panutan bagi siswa dalam menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, baik didalam maupun diluar kelas. Serta Siswa dapat mengikuti pembelajaran PPKn dengan sikap aktif, terbuka, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami sebagai warga negara yang baik. Siswa juga harus bijak dalam menggunakan media sosial, mampu membedakan informasi yang baik dan buruk, serta menjauhi perilaku intoleransi dan individualisme. Dengan membiasakan sikap jujur, disiplin, dan peduli, siswa dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan cinta tanah air. Untuk peneliti lainnya diharapkan informasi yang dihasilkan menjadi lebih luas perspektifnya dan tajam analisisnya, melalui penelitian lebih lanjut menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran di berbagai jenjang dan latar belakang pendidikan. Penelitian lanjutan juga dapat menguji seberapa efektif strategi penguatan disposisi masyarakat dalam jangka panjang.

Referensi

- An'Umillah, A. N., & Nugraha, D. M. (2021). Pentingnya peran *Civic disposition* terhadap karakter remaja pada era globalisasi dan disrupti. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 6(1), 35-41.
- Anwar, M. (2018). *Menjadi guru profesional*. Prenada Media.
- Aprilia, A., & Nawawi, E. (2023). Penguatan *Civic disposition* Dalam Membentuk Karakter Siswa Melalui Budaya Sekolah. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(01), 109-120.
- Arikunto, S. (2017). Pengembangan instrumen penelitian dan penilaian program. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 53.
- Asmaroini, A. P. (2016). Implementasi *Civic disposition* bagi siswa di era globalisasi. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 440-450.
- Belina, A. (2023). Semi-structured interviewing as a tool for understanding informal civil society. *Voluntary Sector Review*, 14(2), 331-347.
- Branson, M. S. (1998). *The Role of Civic Education*. Center for Civic Education.
- Buchari, A. (2018). Peran guru dalam pengelolaan pembelajaran. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 12(2), 106-124.
- Cahyani, K., & Dewi, D. A. (2021). Peran guru pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter siswa agar menciptakan siswa yang berkualitas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 268-281.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Damanhuri, D., Bahrudin, F. A., Legiani, W. H., & Rahman, I. N. (2016). Implementasi *Civic disposition* Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa. *Untirta Civic Education Journal*, 1(2).

- Fadhilah, E. A., & Dewi, D. A. (2022). Penguanan *Civic disposition* Di Tengah Era Globalisasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1121-1127.
- Friedman, T. L. (2005). *The world is flat: A brief history of the twenty-first century*. Macmillan.
- Hafizah, N. (2023). Pengaruh globalisasi terhadap kebudayaan bangsa Indonesia. *Journal of Creative Student Research*, 1(1), 37-41.
- Hariyanto, H., Jahiban, M., & Herianto, E. (2019). Strategi Guru PPKn Dalam Penguanan Karakter Siswa SMPN 2 Mataram. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 6(1).
- Haqiem, A., & Nawawi, E. (2023). Implementasi penguatan *Civic disposition* pada era globalisasi pendidikan Abad-21di SMA Negeri 1 Palembang. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(01), 126-135.
- Indonesia, U. U. R. (2003). Sistem pendidikan nasional. *Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum*.
- Irwan, I., & Tiara, M. (2021). Penguanan *Civic disposition* Pada Pembelajaran PPKn dalam Meningkatkan Ketahanan Pribadi Guru Sekolah Menengah Pertama Remote Area di Kabupaten Kepulauan Mentawai Sumatera Barat. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(3), 398-416.
- Jihad, A. (2013). *Menjadi guru profesional: Strategi meningkatkan kualifikasi dan kualitas guru di era global*. Penerbit Erlangga.
- Karwati, E., & Priansa, D. J. (2014). Manajemen Kelas (Classroom Management) Guru Profesional yang Inspiratif. *Kreatif, Menyenangkan dan Berprestasi*, Bandung: Alvabeta.
- Kemendikbud, R., & Kemendikbud, K. B. S. D. M. (2022). *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia*.
- Kohlberg, L. (1971). *Stages of moral development as a basis for moral education* (pp. 24-84). Cambridge: Center for Moral Education, Harvard University.
- Kuantitatif, P. P. (2016). Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D. *Alfabeta*, Bandung.
- Kuantitatif, P. P. (2016). *Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Kusnaeni, M. W., Dirgantoro, A., & Djatmiko, A. A. (2024). Penguanan Civic Disposition Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dalam Meningkatkan Perilaku Berkesadaran Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 6486-6495.
- Lickona, T. (1992). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. 3rd.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Revisi)*. Bandung: PT remaja rosdakarya, 102-107.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif, cet. XI*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muthmainah, A., Melisa, D. C., Dwitami, D., Anggia, I. R., Putri, N. N. K., Al Hanif, S., ... & Furnamasari, Y. F. (2024). Peran Guru dalam Mendidik Generasi Muda dengan *Civic Disposition*. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(2), 2310-2318.
- Mulyono, B. (2017). Reorientasi civic disposition dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya membentuk warga negara yang ideal. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 218-225.

- Mutmainah, D., & Kamaluddin, K. (2018). Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membentuk sikap dan kepribadian siswa. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 45-54.
- Nuryana, A., Pawito, P., & Utari, P. (2019). Pengantar metode penelitian kepada suatu pengertian yang mendalam mengenai konsep Fenomenologis . *Ensains Journal*, 2(1), 19-24.
- Nasional, D. P. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum*, 6.
- Palunga, R., & Marzuki, M. (2017). Peran guru dalam pengembangan karakter siswa di sekolah menengah pertama negeri 2 depok sleman. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 8(1).
- Pangalila, T. (2017). Peningkatan civic disposition siswa melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(1), 91-103.
- Patton, M. Q. (2014). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice*. Sage publications.
- Pebriani, Y. N., & Dewi, D. A. (2022). Peran guru dalam menerapkan *Civic disposition* bagi siswa sekolah dasar di era globalisasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1432-1439.
- Piaget, J., & Cook, M. (1952). *The origins of intelligence in children (Vol. 8, No 5, pp. 18-1952)*. New York: International universities press.
- Rahardjo, M. (2010). *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*. Universitas Negeri Semarang. https://staff.unnes.ac.id/docs/penelitian/Mudjia_Triangulasi.pdf
- Rahayu, A. S. (2017). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)*. Bumi Aksara.
- Ramadhan, M. A., Syaifi, S. R. A., Arsalan, F. N., & Fitriono, R. A. (2022). Peranan Pancasila di era globalisasi. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(03), 78-84.
- Regi Pratasyah Vasudewa & Novianti Setuningsih (Tim Redaksi). Kompas.com, 2023. *KPAI Sebut Ada 2.355 Kasus Pelanggaran Perlindungan Anak Selama 2023, 861 di Lingkungan Pendidikan*.
- Saputri, R. Y., & Najicha, F. U. (2023). Penguatan *Civic disposition* dan Penanaman Wawasan Kebangsaan Pada Generasi Muda. *Jurnal Rontal Keilmuan PKn*, 9(1), 1-6.
- Sila, I. M., Santika, I. G. N., & Dwidayani, N. M. A. (2023). Meningkatkan Sikap Disiplin Siswa Melalui Optimalisasi Peran Guru PPKn Dalam Menginternalisasikan *Civic Disposition*. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(2), 41-48.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* . Alfabeta Bandung.
- Susilawati, E., Sarifudin, S., & Muslim, S. (2021). Internalisasi nilai Pancasila dalam pembelajaran melalui penerapan profil pelajar Pancasila berbantuan platform Merdeka Mengajar. *Jurnal Teknodik*, 155-167.
- Umar, H. (2013). Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis (kedua). *Rajawali Pers*.
- Wahyuni, D., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2021). Penerapan *Civic disposition* dalam Kehidupan Generasi “Z” di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9061-9065.
- Wenni, S., Situmeang, N. K., Sitompul, S. H., Nurhayati, F., & Siregar, W. M. (2024). Peran Guru PKn dalam Membentuk Wawasan Kebangsaan Siswa di Era Globalisasi. *Bhinneka: Jurnal Bintang Pendidikan dan Bahasa*, 2(3), 90-97.
- Yusuf, M., & Idrus, M. (2024). Peranan Guru PPKn dalam Penguatan Pendidikan Karakter Terhadap Nilai Utama Karakter Nasionalisme Siswa di SMP Negeri 20 Kendari. *SELAMI IPS*, 17(1), 33-38.



Zuhdi, T. (2014). Pendidikan karakter di Indonesia: Antara asa dan realita. *Jurnal kependidikan*, 2(2), 66-84.